



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp/Fax (0351) 749152, Email :
badankeuangan@ngawikab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan nikmatNya sehingga Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Tahun 2024. Tak lupa pula shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Renja Badan Keuangan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja Badan Keuangan Tahun 2024 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Tahun 2024 ini disadari masih terdapat kekurangan, namun seluruh jajaran aparatur Badan Keuangan Kabupaten Ngawi berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja guna terwujudnya pengelolaan Keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib.

Demikian semoga bermanfaat.

Ngawi, 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI



Drs. IRI PUJU HANDONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19660409 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu & Capaian Renstra PD.....	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	57
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	63
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	65
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	87
BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	89
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	89
3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD.....	90
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	95
BAB V PENUTUP.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 SOTK Badan Keuangan.....	7
Gambar 2 Sistematika Renja	13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Capaian Renstra PD	16
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	59
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	66
Tabel 2.5 Usulan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022.....	88
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan PD.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Renja PD, oleh karena itu penyusunan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Renja PD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta yang berpedoman pada Rencana Strategis PD (Renstra PD). Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja PD dalam tahun berjalan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dilaporkan dalam suatu laporan Kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Renja PD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja PD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyalarsan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra PD dan RPJMD tahun bersangkutan. Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2020 mempunyai fungsi penting dalam sistem Perencanaan Daerah karena Renja PD menerjemahkan perencanaan Strategis Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan harus berpedoman pada :

1. RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025;
2. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2024;

3. Hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja;
4. Pedoman penyusunan Renja PD Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Keuangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sebagai berikut:

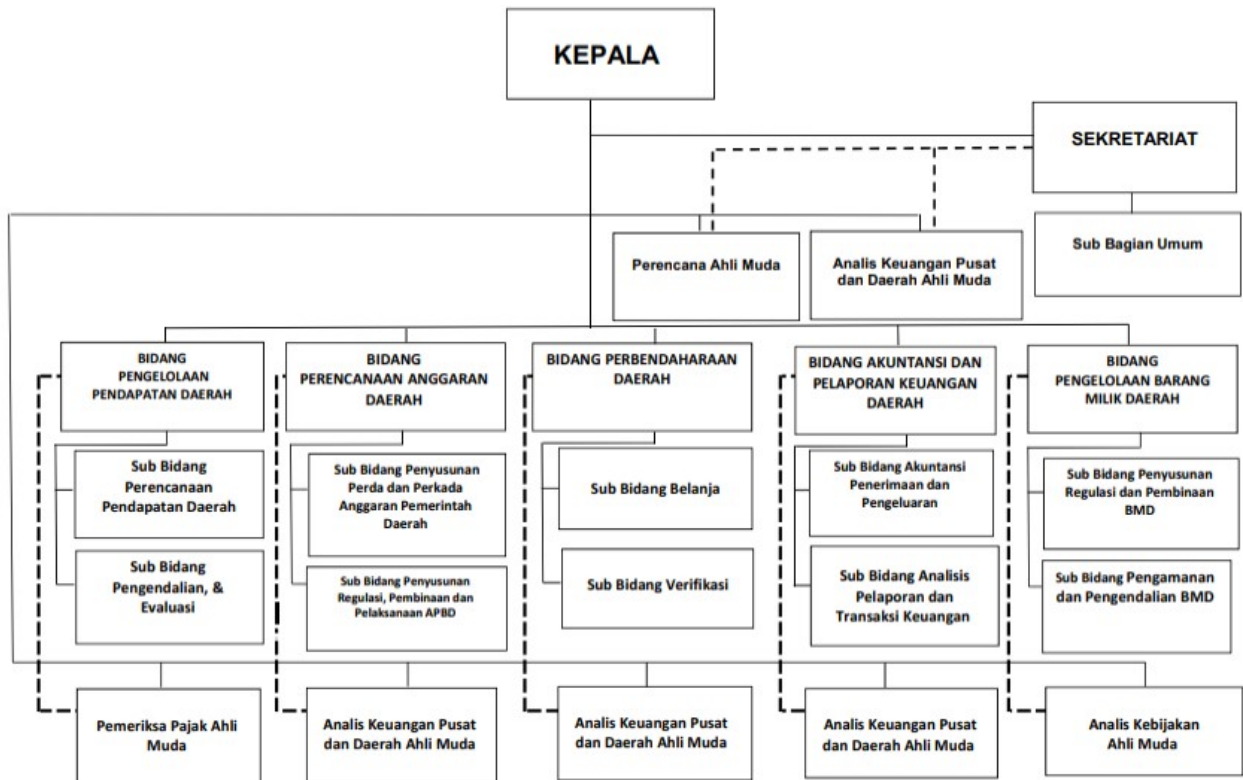
- a. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi pada Badan Keuangan;
- b. Penyusunan Kebijakan Teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan keuangan dan barang milik daerah; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Keuangan mempunyai kewenangan :

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- c. penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. penyusunan rencana dan melaksanakan kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah;
- e. penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang RAPBD dan PAPBD;
- f. penyusunan dan melaksanakan Kebijakan penatausahaan APBD;
- g. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
- h. penyusunan dan melaksanakan kebijakan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- i. penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. penyusunan Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. penyusunan Laporan semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya;
- l. melaksanakan Pemungutan pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengkoordinasikan dan fasilitasi pendapatan daerah;
- m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan APBD;
- n. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;

- o. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- p. melakukan penagihan piutang daerah;
- q. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- r. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah daerah;
- s. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan tentang pengelolaan barang milik daerah;
- u. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

Susunan Organisasi Badan Keuangan yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. SOTK Badan Keuangan

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 31. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
36. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 1);
56. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan.

Tujuan disusunnya Renja Badan Keuangan Tahun 2024 adalah :

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Renja Badan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagaimana gambar dibawah ini :

BAB I.	PENDAHULUAN
	1.1 <u>Latar Belakang</u>
	1.2 <u>Landasan Hukum</u>
	1.3 <u>Maksud dan Tujuan</u>
	1.4 <u>Sistematika Penulisan</u>
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU
	2.1 <u>Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD</u>
	2.2 <u>Analisis Kinerja Pelayanan PD</u>
	2.3 <u>Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD</u>
	2.4 <u>Review terhadap Rancangan Awal RKPD</u>
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PD
	3.1 <u>Telaahan terhadap Kebijakan Nasional</u>
	3.2 <u>Tujuan dan Sasaran renja PD</u>
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
BAB V.	PENUTUP

Gambar 2. Sistematika Penulisan Renja

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) yaitu Tahun Anggaran 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) yaitu Tahun Anggaran 2023, mengacu pada APBD Tahun berjalan. Pada Tahun 2023 pagu anggaran Rp. 489.418.008.870,00 mengampu 4 program, 14 kegiatan, 73 sub kegiatan, sedangkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 total pagu Badan Keuangan Rp. 464.533.804.326,00 mengampu 4 program, 14 kegiatan, 58 sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Berdasarkan target kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 secara umum sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak memenuhi** target kinerja yang direncanakan;
 - Program pengelolaan keuangan daerah dengan target 100 % dan realisasi 99,27 %
2. Realisasi program/kegiatan yang **telah memenuhi** target kinerja yang direncanakan;
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja yang direncanakan; tidak ada
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - Realisasi sesuai kebutuhan dan kondisi tahun berjalan contoh untuk penerbitan SP2D melebihi target karena perubahan mekanisme (SP2D menunjuk by name) yaitu Bantuan Keuangan Siswa Miskin. SPD melebihi target karena ada pergeseran anggaran yang mengharuskan menerbitkan ulang SPD, pelaksanaan rekonsiliasi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran karena refocusing makan ada yang tidak bisa dilaksanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD
 - Tingkat capaian program Renstra PD tidak optimal
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - Melakukan penyesuaian waktu pelaksanaan anggaran per bulan (anggaran kas) yang sudah ditetapkan.
 - Perubahan Renstra PD pasca ditetapkannya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 - Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam penyusunan target kinerja disesuaikan dengan pagu indikatif.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Ngawi

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2021)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2022)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5			6		7		8=7/6	9		10 = 5+7+9			11=10/4			
5.2.1	BADAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN	100	%	525.878.838.349	100	%	473.218.664.640	100	%	501.574.856.741	100	%	455.396.327.349	91	100	%	525.878.838.349		1.437.154.270.546	273%
5.2.5.2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	100	%	22.420.476.089	100	%	37.061.745.969	100	%	22.213.336.697	100	%	13.780.589.739	62	100	%	22.420.476.089	100	55.974.292.505	250%
5.2.5.2.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu	100	%	225.975.000	100	%	17.838.804.292	100	%	184.000.000	100	%	25.288.800	13,74%	100	%	225.975.000		429.209.800	

5.2 5.2.1 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang Disusun	11	Doku men	19.244.00 0	22	Doku men	13.350.00 0	12	Doku men	14.000.000	12	Doku men	9.250.000	66,0 7%	11	Doku men	19.244.00 0		41.844.000	217 %
		Jumlah Dokumen Penganggaran OPD yang disusun	0	Doku men		4	Doku men		4	Doku men		4	Doku men			0	Doku men			-	
5.2 5.2.1 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	2	Doku men	7.075.000											2	Doku men	7.075.000		7.075.000	100 %
5.2 5.2.1 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	4	Doku men	3.675.000											4	Doku men	3.675.000		3.675.000	100 %
5.2 5.2.1 1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	2	Doku men	5.035.000											2	Doku men	5.035.000		5.035.000	100 %
5.2 5.2.1 1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	4	Doku men	4.000.000											4	Doku men	4.000.000		4.000.000	100 %
5.2 5.2.1 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Kinerja OPD yang disusun	6	Doku men	186.946.0 00	12	Doku men	164.596.0 00	6	Doku men	170.000.000	6	Doku men	16.038.80 0	9,43 %	6	Doku men	186.946.0 00		367.580.800	197 %
		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan				1	Kali													-	

5.2 5.2.1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100	%	18.276.14 4.759	100	%	17.660.85 8.292	100	%	19.368.940. 697	100	%	11.261.24 9.709	58,1 4%	100	%	18.276.14 4.759	100	%	47.198.252.7 60	258 %
5.2 5.2.1 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	28	Doku men	18.269.20 7.759	28	Doku men	17.654.80 1.292	28	Doku men	19.361.659. 497	28	Doku men	11.254.53 7.009	58,1 3%	28	Doku men	18.269.20 7.759			47.178.546.06 0	258 %
		Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	11 20	Doku men		1120	Doku men		112 0	Doku men		112 0	Doku men			11 20	Doku men				-	
5.2 5.2.1 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang Disusun	48	Lapor an	6.937.000	48	Lapor an	6.057.000	48	Lapor an	7.281.200,0 0	48	Lapor an	6.712.700	92,1 9%	48	Lapor an	6.937.000			19.706.700	284 %
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang di susun	2	Lapor an		2	Lapor an		2	Lapor an		2	Lapor an			2	Lapor an				-	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	48	Lapor an												48	Lapor an				-	
5.2 5.2.1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Disiplin dalam Setahun	100	%	303.173.5 00	100	%	195.577.1 00	100	%	249.600.000	100	%	322.333.8 50	129, 14%	100	%	303.173.5 00	100	%	821.084.450	271 %
5.2 5.2.1 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli/diadakan	0	Mete r	79.521.00 0	255	Meter	82.421.00 0	240	Meter	89.600.000, 00	240	Mete r	68.215.05 0	76,1 3%	0	Mete r	79.521.00 0			230.157.050	289 %

		Jumlah Pakaian Batik yang di beli / diadakan	0	Poting		170	Poting		80	Poting		80	Poting		0	Poting				-		
		Jumlah Pakaian olah raga yang di beli / diadakan		Stel		85	Stel									Stel				-		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	3	Paket											3	Paket				-		
5.2 5.2.1 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat / Sosialisasi / Bimtek	40	Orang	223.652.500	40	Orang	113.156.100	150	Orang	160.000.000	150	Orang	254.118.800	158,82%	40	Orang	223.652.500		590.927.400	264%	
		Jumlah Diklat dan Pelatihan yang diadakan	1	Kali		1	Kali		2	Kali		2	Kali			1	Kali			-		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	Orang		150	Orang								150	Orang				-		
5.2 5.2.1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun	100	%	646.269.860	100	%	313.238.575	100	%	532.035.000	100	%	578.455.100	108,73%	100	%	646.269.860	100	%	1.575.771.035	244%
5.2 5.2.1 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	100	%	10.783.360	100	%	11.971.700	100	%	15.000.000	100	%	5.309.000	35,39%	100	%	10.783.360		28.064.060	260%	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket											1	Paket				-		

5.2 5.2.1 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ATK	100	%	182.475.000	100	%	147.955.000	100	%	150.000.000	100	%	127.600.600	85,07%	100	%	182.475.000		458.030.600	251%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket			Paket									1	Paket			-	
5.2 5.2.1 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan yang disediakan			14.137.000			37.807.500	6000	Kotak	69.000.000	6000	Kotak	46.201.000	66,96%			14.137.000		98.145.500	694%
		Jumlah Minuman yang disediakan							300	Dus		300	Dus							-	
		Jumlah Air Isi Ulang ang disediakan							100	Galon		100	Galon							-	
		Jumlah Minuman yang disediakan							1500	Botol		1500	Botol							-	
		Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				2.300														-	
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	Paket												3	Paket			-	
5.2 5.2.1 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak			115.364.500	48.393	Lembar	60.861.000	50000	Lembar	65.000.000	50000	Lembar	112.595.000	173,22%			115.364.500		288.820.500	250%
		Jumlah Barang yang digandakan	50.000	Lembar		25	Lembar		50000	Lembar		50000	Lembar			50.000	Lembar			-	
		Jumlah Iklan / Publikasi Media Cetak							10	Kali		10	Kali							-	

			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket											10	Paket				-			
5.2 5.2.1 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang disediakan				153.891.000	36	Eksemplar	15.201.000	12	Eksemplar	63.035.000	12	Eksemplar	144.283.000	228,89%			153.891.000			313.375.000	204%	
		Jumlah Buku Peraturan Perundang - undangan yang disediakan					12	Buku		5	Buku		5	Buku								-		
		Jumlah Paket Iklan yang disediakan					1	Paket														-		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan					5	Dokumen									5	Dokumen					-	
		Jumlah Sosialisasi / Bimtek Peraturan Perundang Undangan yang diadakan					2	Kali									2	Kali					-	
5.2 5.2.1 1.2.06.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.300.000	24	Laporan									24	Laporan	10.300.000			10.300.000	100%	
		Jumlah Mamin Kujungan Tamu yag disediakan					2000	Kotak									2000	Kotak					-	
5.2 5.2.1 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar yang dihadiri / diikuti				159.319.000	40	Kali	77.249.875	200	Kali	170.000.000	200	Kali	142.466.500	83,80%	40	Kali	159.319.000			379.035.375	238%	
		Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam yang dihadiri /diikuti								200	Kali		200	Kali									-	

			Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan										200	Laporan					-	
			Jumlah Mamin Rapat SKPD yang disediakan	500	Kotak										500	Kotak						-
5.2 5.2.1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan sesuai dengan Kebutuhan dalam Setahun	100	%	1.420.340.970	100	%	9.336.000	100	%	543.761.000	100	%	223.157.000	41,04%	100	%	1.420.340.970	100	%	1.820.973.970	128%
5.2 5.2.1 1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang disediakan	1	Unit	472.468.000						313.761.000,00				1	Unit	472.468.000			472.468.000	100%	
5.2 5.2.1 1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan DinasOperasion al atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	Unit	313.761.000										1	Unit	313.761.000			313.761.000	100%	
5.2 5.2.1 1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7	Unit	25.883.000	5	Unit	9.336.000			25.000.000,00				7	Unit	25.883.000			35.219.000	136%	
5.2 5.2.1 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Diadakan			575.633.970			168.140.000	30	Unit	180.000.000	30	Unit	195.270.000	108,48%		575.633.970			939.043.970	163%	
		Jumlah Mesin Absensi yang diadakan				1	unit														-	
		Jumlah Peralatan kerja yang Dibeli / diadakan				24	Unit															-

			Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	31	Unit											31	Unit					-	
5.2 5.2.1 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan			32.595.000				12	Unit	25.000.000,00	12	Unit	27.887.000	111,55%			32.595.000				60.482.000	186%
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		5	Unit											5	Unit					-	
5.2 5.2.1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100	%	1.165.922.000	100	%	1.001.177.410	100	%	1.097.500.000	100	%	1.037.385.360	94,52%	100	%	1.165.922.000	100	%	3.233.576.770	277%	
5.2 5.2.1 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim			32.500.000	200	Surat	435.000	300	Surat	2.500.000	300	Surat	205.300	8,21%			32.500.000				33.140.300	102%
		Jumlah Laporan Jasa Surat Menurat		50	Laporan											50	Laporan					-	
5.2 5.2.1 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang di Bayarkan		12	rekening	451.703.000	12	rekening	492.512.410	12	Rekening	460.000.000	12	Rekening	435.803.710	94,74%	12	rekening	451.703.000			1.380.019.120	306%
		Jumlah Rekening Telepon yang di bayarkan (3x12)		12	Rekening		12	Rekening		36	Rekening		36	Rekening			12	Rekening				-	
		Jumlah Rekening Internet yang dibayarkan		12	rekening		12	rekening		12	Rekening		12	Rekening			12	rekening				-	
		Jumlah Rekening Air yang di bayarkan		12	rekening		12	rekening		12	Rekening		12	Rekening			12	rekening				-	

		Jumah Web Hosting yang dibayar	1	paket		1	paket		12	Rekening		12	Rekening		1	paket			-	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	60	Laporan											60	Laporan			-	
5.2 5.2.1 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan yang dibeli	110	Buah	66.204.000			29.092.000	110	Buah	25.000.000	110	Buah	66.496.350	265,99%	110	Buah	66.204.000	161.792.350	244%
		Jumlah Bahan Kebersihan yang dibeli	148	Buah					148	Buah		148	Buah			148	Buah		-	
		Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan (3x 12)	18	orang/bulan					36	orang/bulan		36	orang/bulan			18	orang/bulan		-	
		Jumlah Alat / bahan Kebersihan yang dibeli	103	Buah					103	Buah						103	Buah		-	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	36	Laporan					36	Laporan						36	Laporan		-	
5.2 5.2.1 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Honor (Jumlah Orang x Bulan)	150	OB	615.515.000,00			508.230.000	114	OB	610.000.000,00	114	OB	534.880.000	87,69%	150	OB	615.515.000,00	1.658.625.000	269%
		Jumlah Pembayaran Lembur (JUmlah Orang x Hari)	2168	OJ					17712	OJ		17712	OJ			2168	OJ		-	
		Jumlah Benda Pos / Materai yang Diadakan	816	Buah					816	Buah		816	Buah			816	Buah		-	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan											12	Laporan					-		
5.2 5.2.1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dalam setahun		100	%	382.650.000	100	%	42.754.300	100	%	237.500.000	100	%	332.719.920	140,09%	100	%	382.650.000	100	%	895.423.720	234%	
5.2 5.2.1 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Jabatan				62.000.000			39.489.500	1	Unit	45.000.000,00	1	Unit	31.586.320	70,19%					62.000.000	133.075.820	215%	
		Jumlah Kendaraan Jabatan yang dibayar Pajaknya								2	Unit/Tahun		2	Unit/Tahun									-	
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan					1	unit/tahun															-	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di bayar Pajaknya					1	unit															-	

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang diPelihara dan di bayar Pajaknya	1	Unit											1	Unit			-	
5.2 5.2.1 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional			68.900.000	1	Unit / Tahun	42.754.300	4	Unit / Tahun	52.500.000,00	4	Unit / Tahun	52.809.900	100,59%			68.900.000		164.464.200	239%
		Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dibayar Pajaknya				39	unit		31	Unit		31	Unit							-	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan Perizinannya		44	Unit											44	Unit			-	
5.2 5.2.1 1.2.09.6	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		15	Unit	8.000.000					15.000.000,00					15	Unit	8.000.000		8.000.000	100%
5.2 5.2.1 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kerja			23.750.000			7.885.000	55	Kali	25.000.000,00	55	Kali	60.625.000	242,50%			23.750.000		92.260.000	388%

			Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara				45	Kali													-	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	47	Unit											47	Unit				-	
5.2 5.2.1 1.2.09.9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara			220.000.000				300	M2	100.000.000,00	300	M2	187.698.700	187,70%			220.000.000			497.623.700	226%
			Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan				1	Paket													-	
			Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	4	Unit											4	Unit				-	
5.2 5.2.1 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat Waktu	100	%	500.090.314.760	100	%	433.029.808.881	100	%	476.098.472.544	100	%	437.914.699.841	91,98%	100	%	500.090.314.760	100	%	1.370.983.782.982	274%
5.2 5.2.1 2 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran yang disusun Tepat Waktu Daerah	100	%	1.324.039.000	100	%	1.111.948.400	100	%	1.268.648.900	100	%	1.969.696.193	155,26%	100	%	1.324.039.000	100	%	4.354.643.093	329%
5.2 5.2.1 2.2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	46	Dokumen	98.181.500				94	Dokumen	241.820.000,00	94	Dokumen	79.555.000	32,90%	46	Dokumen	98.181.500			278.978.500	284%

		Persentase Belanja Pendidikan						20	%		20	%								-	
		Persentase Belanja Kesehatan						10	%		10	%								-	
		Jumlah Koordinasi dengan SKPD	4	Kali				4	Kali		4	Kali			4	Kali				-	
		Jumlah Dokumen KUA yang disusun				1	Doku men													-	
		Jumlah Dokumen PPAS yang disusun				1	Doku men													-	
5.2	5.2.1 2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	46	Doku men	99.084.00 0			58.437.30 0	94	Doku men	57.405.500,0 0	94	Doku men	66.962.50 0	116, 65%	46	Doku men	99.084.00 0		224.483.800	227 %
		Persentase Belanja Pendidikan						20	%		20	%								-	
		Persentase Belanja Kesehatan						10	%		10	%								-	
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	4	Kali				4	Kali		4	Kali			4	Kali				-	
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA yang disusun				1	Doku men													-	

	Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																				
		Jumlah Dokumen Informasi Keuangan Daerah yang Dapat diAkses Publik	1	Doku men					1	Doku men		1	Doku men			1	Doku men				-
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	4	Kali					4	Kali		4	Kali			4	Kali				-
		Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2	Doku men												2	Doku men				-
		Jumlah Pemeliharaan Jaringan Server yang dilaksanakan							1	Paket		1	Paket								-
		Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	46	Doku men												46	Doku men				-
		Jumlah Perbup APBD yang disusun dalam 1 tahun					1	Doku men													-
		Jumlah Perda APBD yang disusun dalam 1 tahun					1	Doku men													-

5.2 5.2.1 2.2.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup APBD yang disusun			648.770.000			320.335.600	9	Doku men	359.920.400,00	9	Doku men	656.415.093	182, 38%			648.770.000		1.625.520.693	251 %
		Jumlah Dokumen Informasi Keuangan Daerah yang dapat diakses Publik	1	Doku men					1	Doku men		1	Doku men			1	Doku men			-	
		Jumlah Koordinasi dengan SKPD	4	Kali					4	Kali		4	Kali			4	Kali			-	
		Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	46	Doku men												46	Doku men			-	
		Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Doku men												8	Doku men			-	
		Jumlah Pemeliharaan Aplikasi yang dilaksanakan							3	Kali		3	Kali							-	

			Jumlah Perbup Peraturan APBD yang disusun dalam 1 tahun				1	Doku men														-	
			Jumlah Perda Perubahan APBD yang disusun dalam 1 tahun				1	Doku men														-	
5.2 5.2.1 2.2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang dilaksanakan							4	Doku men	56.092.000,00											-	
		Jumlah Dokumen SBU yang disusun							2	Kali												-	
5.2 5.2.1 2 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan / Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan Tepat Waktu	100	%	854.229.500	100	%	902.339.000	100	%	794.229.500	100	%	667.151.361	84,00%	100	%	854.229.500	100	%	2.423.719.861	284%	
5.2 5.2.1 2.2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas Harian yang disusun	264	Lapor an	153.213.500	264	Lapor an	496.573.000	264	Lapor an	131.478.000	246	Lapor an	237.886.500	180,93%	264	Lapor an	153.213.500				887.673.000	579%
		Persentase SILPA Terhadap APBD	0,7	%					1	%		10	%				0,7	%				-	
5.2 5.2.1 2.2.02.2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	1	Lapor an	5.580.000	2	Lapor an	810.000			5.580.000					1	Lapor an	5.580.000				6.390.000	115%
		Persentase SILPA Terhadap APBD	6,7	%												6,7	%					-	

5.2 5.2.1 2.2.02.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D yang diterbitkan			410.478.000	14300	Surat	349.609.500	15.500	Surat	397.398.500	18.889	Surat	283.440.500	71,32%			410.478.000		1.043.528.000	254%
		Jumlah SPD yang diterbitkan				282	Surat		305	Laporan		306	Laporan							-	
		Jumlah SPM yang diteliti				14300	Surat		15500	Surat		18889	Surat							-	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	28184	Dokumen												28184	Dokumen			-	
5.2 5.2.1 2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan dan Koordinasi Dana Transfer yang disusun			22.857.000	50	Laporan	7.883.000	35	Laporan	32.355.000	37	Laporan	11.023.500	34,07%			22.857.000		41.763.500	183%
		Jumlah LKT (Laporan Konfirmasi Transfer) yang disusun				4	Laporan		4	Laporan		4	Laporan							-	

			Jumlah Dokumen Hasil ,Fasilitasi,Asistensi,Sinkronisasi,Supervisi,Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42	Dokumen											42	Dokumen				-	
5.2 5.2.1 2.2.02.6	Koordinasi , Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4	Dokumen	3.022.500											4	Dokumen	3.022.500			3.022.500	100 %
5.2 5.2.1 2.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Gaji			83.813.000	14	Kali	43.053.500	12	Kali	195.014.000	12	Kali	112.913.861	57,90%			83.813.000			239.780.361	286 %
		Jumlah Laporan Kas Mingguan				48	Laporan														-	

		Jumlah Pembinaan SKPD				4	Kali		4	Kali											-
		Jumlah Rekonsiliasi gaji				12	Kali		12	Kali											-
		Persentase Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah APBD							26	%											-
		Jumlah Dokumen Juknis / Sisdur Penatausahaan yang disusun							1	Doku men											-
		Jumlah laporan Kas dan Perkiraan Belanja yang disusun							12	Doku men											-
		Jumlah SKPP yang diterbitkan				525	Surat		750	Surat											-

			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Adearah, Laporan Aliran Kas , dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan pihak ke tiga (PFK) dan Laporan hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alisan Kas dan Pelaksanaan Pemungutan / Potongan dan Penyetoran Perhiyangan Pihak Ke tiga (PFK)	478	Laporan												478	Laporan			-	
5.2 5.2.1 2.2.02.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	JJumlah Rekonsiliasi BKU yang dilaksanakan			28.579.000	8	Kali	4.410.000	4	Kali	32.404.000	4	Kali	21.887.000	67,54%			28.579.000			54.876.000	192%

			Jumlah Rekonsiliasi DTH/RTH yang dilaksanakan				13	Kali		12	Kali									-	
			Jumlah Rekonsiliasi Posisi Kas dengan Bank Jatim yang dilaksanakan				264	Kali		264	Kali			246	Kali						-
			Jumlah Rekonsiliasi SPJ Fungsional yang dilaksanakan				8	Kali		4	Kali			4	Kali						-
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pwngeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	270	Dokumen											270	Dokumen				-
			Jumlah Rekonsiliasi dengan SKPD	4	Kali											4	Kali				-
5.2.5.2.1 2.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Mengikuti Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	188	Orang	146.686.500											188	Orang	146.686.500		146.686.500	100%
		Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	2	Kali												2	Kali				-

	5.2 5.2.1 2 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun tepat Waktu dan Sesuai SAP	100	%	984.475.000	100	%	608.297.200	100	%	945.275.000	100	%	1.131.461.500	119,70%	100	%	984.475.000	100	%	2.724.233.700	277%
	5.2 5.2.1 2.2.03.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas Daerah yang dilaksanakan			108.430.000	12	Kali	61.806.500	168	Kali	121.955.000,00	168	Kali	245.475.000	201,28%			108.430.000			415.711.500	383%
			Jumlah Koordinasi Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah yang dilaksanakan				13	Kali		564	Kali		564	Kali								-	
			Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	16000	Kali		12	Kali		16000	Kali		16000	Kali			16000	Kali				-	
			Jumlah Laporan Koordinasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	144	Laporan												144	Laporan				-	
	5.2 5.2.1 2.2.03.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan yang dilaksanakan			125.222.000			84.294.500	612	Kali	122.670.000,00	612	Kali	175.160.000	142,79%			125.222.000			384.676.500	307%

			Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan			94	Kali														-
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset , Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan , Pendapatan -LO dan Beban	73 2	Doku men										73 2	Doku men					-
5.2 5.2.1 2.2.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulan dan Semesteran	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			127.518.000	8	Kali	54.528.200			140.620.000,00						127.518.000			182.046.200	143 %
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulan dan Semesteran yang disusun	18	Kali											18	Kali					-
5.2 5.2.1 2.2.03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang disusun			39.550.000	47	Lapor an	182.829.000	67	Lapor an	-	67	Lapor an	114.333.000	0,00 %		39.550.000			336.712.000	851 %

		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan , Triwulan dan semesteran yang disusun						170	Laporan		170	Laporan								-
		Persentase Program Kegiatan yang Tidak dilaksanakan	10	%				10	%		10	%			10	%				-
		Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	1	%				1	%		1	%			1	%				-
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,1	%				0,1	%		0,1	%			0,1	%				-
		Jumlah Publikasi yang Dilaksanakan untuk Transparansi Publik	2	Kali				1	Kali		1	Kali			2	Kali				-
		Jumlah Dokumen yang Dapat diakses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah	1	Dokumen				1	Dokumen		1	Dokumen			1	Dokumen				-

5.2.5.2.1 2.2.03.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Disusun	2	Dokumen	107.014.000				2	Dokumen	44.776.000,00	2	Dokumen	80.647.000	18,11%	2	Dokumen	107.014.000		187.661.000	175%
5.2.5.2.1 2.2.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah yang disusun	5	Dokumen	171.339.000		131.673.500		5	Dokumen	109.758.000,00	5	Dokumen	184.001.000	167,64%	5	Dokumen	171.339.000		487.013.500	284%
		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan					2	Kali												-	
5.2.5.2.1 2.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan yang dilaksanakan	1	Kali	145.964.000				3	Kali	236.194.000,00	3	Kali	170.227.500	72,07%	1	Kali	145.964.000		316.191.500	217%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	60	Orang												60	Orang			-	

	5.2 5.2.1 2 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam setahun	10 0	%	496.624. 805.760	100	%	430.407.2 24.281	100	%	473.065.31 9.144	100	%	434.146. 390.787	91,7 7%	10 0	%	496.624. 805.760	100	%	1.361.178.42 0.828	274 %
	5.2 5.2.1 2.2.04.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang Mendapatkan ADD	21 3	Desa	480.388.9 22.945	852	Desa	415.904.9 09.000	852	Desa	452.909.660 .847,69	852	Desa	425.157.4 11.200	93,8 7%	21 3	Desa	480.388.9 22.945			1.321.451.243 .145	275 %
			Jumlah Desa yang Mendapatkan SARPRAS	21 3	Desa		213	Desa		213	Desa		213	Desa			21 3	Desa				-	
			Jumlag Desa yang Mendapatkan Bantuan Keuangan BINA MITRA				5	Desa		9	Desa		9	Desa								-	
			Jumlah RT yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RT	56 16	RT		5604	RT		561 6	RT		561 6	RT			56 16	RT				-	
			Jumlah RW yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RW	12 11	RW		1212	RW		121 1	RW		121 1	RW			12 11	RW				-	
			Jumlah Laporan Bantuan Keuanganyang disusun							145 2	Doku men		145 2	Doku men								-	
			Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	1	%					1	%		1	%			1	%				-	

			Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek						213	Orang		213	Orang								-	
			Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	852	Laporan											852	Laporan				-	
			Jumlah Desa yang Mendapatkan DD			426	Desa														-	
5.2 5.2.1 2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	10	Dokumen	6.834.247.670	60	Dokumen	3.970.478.475	12	Dokumen	11.411.630.000,00	12	Dokumen	987.732.715	8,66%	10	Dokumen	6.834.247.670			11.792.458.860	173%
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10	Laporan												10	Laporan				-	
5.2 5.2.1 2.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	10	Dokumen	9.401.635.145	426	Dokumen	10.531.836.806	213	Dokumen	8.744.028.296,50	213	Dokumen	8.001.246.872	91,51%	10	Dokumen	9.401.635.145			27.934.718.823	297%
		Persentase Jumlah Bagi Hasil Kab/ Kota dan desa yang Dikelola	100	%					100	%		100	%			100	%				-	
5.2 5.2.1 2.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan yang dilaksanakan	100	%	302.765.500						25.000.000					100	%	302.765.500	100	%	302.765.500	100%

5.2 5.2.1 2 2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	241.765.500						25.000.000,00				1	Dokumen	241.765.500		241.765.500	100%		
5.2 5.2.1 2 2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	65	Orang Perencana n SKPD	61.000.000										65	Orang Perencana n SKPD	61.000.000		61.000.000	100%		
		Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	213	Orang Perencana n Desa											213	Orang Perencana n Desa			-			
5.2 5.2.1 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tertib	100	%	1.100.838.500	100	%	721.953.040	100	%	1.065.838.500	100	%	1.292.932.955	121,31%	100	%	1.100.838.500	100	%	3.115.724.495	283%

	5.2 5.2.1 3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan / Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat Waktu	10 0	%	1.100.83 8.500	100	%	721.953.0 40	100	%	1.065.838. 500	100	%	1.292.93 2.955	121, 31%	10 0	%	1.100.83 8.500	100	%	3.115.724.49 5	283 %
	5.2 5.2.1 3.2.01.01	Penyusunan Standart Harga	Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	1	Kali	159.053.0 00										1	Kali	159.053.0 00			159.053.000	100 %	
			Jumlah SKPD yang Menyampaikan Usulan SSH	47	SKPD											47	SKPD				-		
			Jumlah Standart Harga yang disusun	2	Doku men											2	Doku men				-		
	5.2 5.2.1 3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang Menyampaikan RKBMD	46	SKPD	51.480.50 0	47	SKPD	23.294.00 0	47	SKPD	184.800.000	47	SKPD	230.418.3 00	124, 69%	46	SKPD	51.480.50 0			305.192.800	593 %
			Jumlah SK Penetapan Status Penggunaan yang disusun				47	SKPD		47	SK	-	47	SK							-		
			Jumlah Dokumen Pengajuan Usulan Pemanfaatan BMD yang dilaksanakan				1	Doku men		2	Doku men	-	2	Doku men							-		
			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	1	Kali					6	Kali		6	Kali			1	Kali				-	

		Jumlah SKPD yang Menyampaikan Usulan SSH							47	SKPD		47	SKPD							-		
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	46	Dokumen											46	Dokumen					-	
5.2 5.2.1 3.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Program	96.162.000										1	Program	96.162.000			96.162.000	100%	
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	1	Kali											1	Kali					-	
5.2 5.2.1 3.2.01.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi Jenis BMD yang dicatat			175.148.500	6	Laporan	296.878.700	6	Laporan	249.000.000	6	Laporan	493.991.455	198,39%		175.148.500			966.018.655	552%	
		Jumlah Daftar Aset Tetap yang disusun							6	Dokumen		6	Dokumen								-	
		Jumlah Dokumen Manual Untuk Penyusunan Daftar Aset Tetap							1	Dokumen		1	Dokumen								-	
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	1	Kali											1	Kali					-	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	Laporan											2	Laporan					-	

5.2 5.2.1 3.2.01.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi dengan SKPD	1	Kali	46.162.00 0											1	Kali	46.162.00 0		46.162.000	100 %
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	1	Lapor an												1	Lapor an			-	
5.2 5.2.1 3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengamanan BMD yang dilaksanakan			241.514.5 00	2	Lapor an	182.948.8 40	4	Lapor an	266.878.500	4	Lapor an	276.038.2 00	103, 43%			241.514.5 00		700.501.540	290 %
		Jumlah Dokumen Asli Kepemilikan BMD yang disimpan	2	Doku men		2	Doku men		2	Doku men		2	Doku men			2	Doku men			-	
		Jumlah Koordinasi dengan SKPD	1	Kali					6	Kali		6	Kali			1	Kali			-	
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik daerah	2	Lapor an												2	Lapor an			-	
5.2 5.2.1 3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Usulan Penghapusan yang ditindaklanjuti			105.179.0 00			151.076.0 00	30	Doku men	246.000.000	30	Doku men	164.888.2 00	67,0 3%			105.179.0 00		421.143.200	400 %

			Jumlah Dokumen Usulan Pemindahtanganan yang dilaksanakan				2	Doku men		5	Doku men		5	Doku men							-		
			Jumlah Dokumen Usulan Penghapusan yang dilaksanakan				15	Doku men														-	
			Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	2	Kali					3	Kali		3	Kali			2	Kali				-	
			Jumlah Koordinasi dengan SKPD	1	Kali					6	Kali		6	Kali			1	Kali				-	
			Jumlah Dokumen Hasil Optomalisasi Penggunaan , Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Doku men											1	Doku men					-	
5.2 5.2.1 3.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan	4	Kali	55.361.50 0	2	Kali	67.755.50 0	9	Kali	119.160.000	9	Kali	127.596.8 00	107, 08%	4	Kali	55.361.50 0			250.713.800	453 %	
		Jumlah rekonsiliasi Inventarisasi Aset Tahunan yang dilaksanakan							9	Kali		9	Kali									-	

		Jumlah Dokumen Nilai Aset yang disusun							6	Doku men		6	Doku men						-	
		Jumlah Koordinasi dengan SKPD	1	Kali					8	Kali		8	Kali			1	Kali			-
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	Lapor an											4	Lapor an				-
5.2 5.2.1 3.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	1	Kali	52.408.500										1	Kali	52.408.500		52.408.500	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang disusun	2	Lapor an											2	Lapor an				-
5.2 5.2.1 3.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	1	Kali	118.369.000										1	Kali	118.369.000		118.369.000	100%
		Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	76	Oran g											76	Oran g				-
		Jumlah SKPD yang Menindaklanjuti Hasil Pembinaan dilaksanakan	46	SKPD											46	SKPD				-

5.2 5.2.1 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap APBD	100	%	2.267.209.000	100	%	2.405.156.750	100	%	2.197.209.000	100	%	2.408.104.814	109,60%	100	%	2.267.209.000	100	%	7.080.470.564	312%
5.2 5.2.1 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD dibanding tahun Sebelumnya	100	%	2.267.209.000	100	%	2.405.156.750	100	%	2.197.209.000	100	%	2.408.104.814	109,60%	100	%	2.267.209.000	100	%	7.080.470.564	312%
5.2 5.2.1 4.2.01.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Kegiatan Perencanaan Pendapatan	10	Kali	93.748.000	1	Kali	181.779.000	10	Kali	70.930.000,00	10	Kali	36.349.000	51,25%	10	Kali	93.748.000			311.876.000	333%
		Jumlah Pendampingan Aplikasi PBB dan BPHTB yang dilaksanakan	2	Kali		2	Kali		2	Kali		2	Kali			2	Kali				-	
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8	Dokumen												8	Dokumen				-	
		Jumlah Survey Potensi Pajak Daerah				1	Kali														-	
5.2 5.2.1 4.2.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Pajak yang diselenggarakan	35	Orang	89.873.000,00			166.840.000	35	Orang	72.332.000,00	35	Orang	29.047.900	40,16%	35	Orang	89.873.000,00			285.760.900	318%

		Jumlah Koordinasi tentang Pengembangan Daerah yang dilaksanakan				2	Kali				3	Kali								-		
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kewajiban Pajak Daerah	3	Dokumen											3	Dokumen					-	
5.2 5.2.1 4.2.01.3	Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan	20.338.000										12	Laporan	20.338.000			20.338.000	100%	
		Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik	12	Kali											12	Kali					-	
5.2 5.2.1 4.2.01.5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Potensi Wajib Pajak Daerah yang disurvey			1.031.411.000			33.245.000	1000	Wajib Pajak	84.960.000,00	1000	Wajib Pajak	14.320.000	16,85%		1.031.411.000			1.078.976.000	105%	
		Jumlah Obyek Pajak Daerah yang didata dan didaftarkan							1500	Obyek Pajak		1500	Obyek Pajak								-	

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah			3	Dokumen														-	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah , Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan											12	Laporan				-	
5.2 5.2.1 4.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Monitoring Pendapatan daerah dan PBB yang Dilaksanakan				19	Kali	9.096.000	12	Kali	12.340.000,00	12	Kali	12.320.000	99,84%			10.765.000			32.181.000	299%
		Jumlah Pemeriksaan Obyek Pajak Daerah Yang dilaksanakan				12	Kali		12	Kali		12	Kali								-	
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan , Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	Laporan												12	Laporan				-	
5.2 5.2.1 4.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi Pajak Daerah yang dipelihara				1	Aplikasi	1.185.451.000	3	Aplikasi	992.863.000,00	3	Aplikasi	977.882.100	98,49%						2.163.333.100	
		Jumlah DHKP,SPPT,dan SKPD yang dicetak				10	Box		652460	Lembar		652460	Lembar								-	
		Jumlah Himbauan Pajak yang dicetak				1	Lembar		1000	Lembar		1000	Lembar								-	

		Jumlahn Obyek Pajak yang ditetapkan				6600 0	Wajib Pajak		630 138	OP		630 138	OP								-	
		Jumlah Pendampingan Penetapan Wajib Pajak Daerah yang dilaksanakan				2	Kali		2	Kali		2	Kali									-
		Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan				6407 50	OP															-
		Jumlah SPPT dan SKPD yang dicetak				1091 750	Lemb ar															-
		Jumlah Dokumen Ketetaaan Pajak Daerah	3	Doku men												3	Doku men					-
5.2 5.2.1 4.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Konsultasi Pajak Daerah yang Dilaksanakan			34.867.00 0	4	Kali	12.455.00 0	4	Kali	39.790.000, 00	4	Kali	4.063.000	10,2 1%			34.867.00 0		51.385.000	147 %	
		Jumlah Pendampingan Pajak Daerah				4	Kali															-
		Jumlah Layanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	40	Layan an												40	Layan an					-
5.2 5.2.1 4.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Deviasi realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD yang Disusun tepat Waktu	0,8	%	96.635.00 0			65.540.50 0	1,95	%	81.113.000	1,95	%	271.306.5 00	334, 48%	0,8	%	96.635.00 0		433.482.000	449 %	

			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	7	Doku men											7	Doku men			-	
			Jumlah Laporan Pendapatan Daerah yang disampaikan tepat Waktu				12	Lapor an												-	
5.2 5.2.1 4.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Intensifikasi/ Penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan			179.706.000	195	Kali	169.767.550	240	Kali	160.218.000	240	Kali	262.610.000	163,91%			179.706.000		612.083.550	341%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Peangihan Pajak Daerah	240	Doku men												240	Doku men			-	
5.2 5.2.1 4.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan			709.866.000	24	Lapor an	580.982.700	12	Lapor an	682.663.000	12	Lapor an	800.206.314	117,22%			709.866.000		2.091.055.014	295%
		Jumlah Dokumen Realisasi PBB yang Di Publikasikan di Wabsite							1	Doku men		1	Doku men							-	
		Jumlah Publikasi yang dilaksanakan uantuk Transparasi dan Partisipasi Publik							5	Kali		5	Kali							-	

		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8	Doku men					5	Kali			5	Kali			8	Doku men			-	
--	--	---	---	-------------	--	--	--	--	---	------	--	--	---	------	--	--	---	-------------	--	--	---	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kondisi target dan capaian kinerja dapat diketahui dengan menggunakan analisa dan metode SWOT sebagai berikut :

1. Strength (kekuatan) Internal
 - a. Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
 - b. Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” berturut-turut atas LKPD Tahun 2013-2021. Hal ini menjadi pemacu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah ke depannya agar selalu optimal, terukur, akuntabel, transparan dan *reliable*
 - c. Memiliki sarana Prasarana dan Sistem Informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Weaknesses (Kelemahan), Internal
 - a. Perubahan Regulasi dan Penerbitan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi
 - b. Terbatasnya sumber daya aparatur dibandingkan dengan beban kerja
3. Opportunities (Peluang) External
 - a. Tugas pokok dan Fungsi strategis dalam rangka fasilitas SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah
4. Treats (ancaman) external
 - a. SKPD yang sering terlambat menyampaikan laporan keuangan
 - b. Banyaknya sumber daya aparatur yang memasuki masa purna tugas/ pensiun (MPP) sehingga diperlukan adanya tambahan pegawai baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya.
 - c. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi Peraturan Perundang-undangan yang kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang

Kinerja Perangkat Daerah di analisis berdasarkan jenis indikator yang ditetapkan pada masing-masing program kegiatan sesuai tugas pokok fungsi. Mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan. Didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) keseluruhan sejumlah 73 (Tujuh Puluh Tiga) orang. Untuk

mengevaluasi Kinerja dilakukan evaluasi atas ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Mendasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah, indikator kinerja yaitu Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), indikator kinerja yaitu Persentase PAD terhadap APBD
3. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, indikator kinerja yaitu Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib
4. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah indikator kinerja yaitu Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib

Kinerja Badan Keuangan secara keseluruhan telah memenuhi target yang direncanakan sebagaimana dilihat di tabel 2.2.

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi**

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			80	80,25	80,5	80,75	85	-	80,5	80,75	
2	Persentase PAD terhadap APBD		Persentase PAD terhadap APBD	11,77%	12,05%	12,66%	13,08%	-	-	12,66%	13,08%	
3	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib		-	97,90%	98,00%	98,25%	98,50%	100%		98,25%	98,50%	
			Persentase Belanja Pendidikan	20%	20%	20%	20%	20%	-	20%	20%	

			Persentase Belanja Kesehatan	10%	10%	10%	10%	10%	-	10%	10%	
			Persentase SILPA (sudah termasuk jumlah laporan silpa)	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	-	6,70%	6,70%	
			Persentase SILPA terhadap APBD	15%	15%	15%	15%	15%	-	15%	15%	
			Persentase Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah APBD	25%	25%	25%	25%	25%	-	25%	25%	
			Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
			Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	
			Persentase Program Kegiatan yang tidak terlaksana	10%	10%	10%	10%	10%	-	10%	10%	

			Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	1%	1%	1%	1%	1%	-	1%	1%	
			Rasio anggaran sisa thd total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	0,10%	
			persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer Expenditures)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,00%	1,00%	
			Persentase Jumlah Bagi Hasil Kab/Kota dan Desa yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
			Persentase Deviasi realisasi PAD thd anggaran PAD dalam APBD yang disusun tepat waktu	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	-	0,86%	0,86%	

			Transparasi dan Partisipasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
			Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib	-	-	95,05%	95,10%	95,15%	95,20%	98,70%		95,20%	98,70%	
		-	Manajemen Aset	95,01%	95,03%	95,05%	95,10%	95,01%	17,08%	95,05%	95,10%	
		-	Transparasi dan Partisipasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	
		-	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	80%	99%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi merupakan kondisi , atau permasalahan yang bersifat mendesak dan harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan, karena dampak yang signifikan baik dalam jangka panjang, menengah maupun tahunan. Isu strategis, disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Ngawi. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokrasi. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi masalah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Ngawi pada tahun 2024.

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah sejauh ini telah memenuhi target yang ditetapkan, namun ada hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah yang perlu diperhatikan antara lain yaitu :

1. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi
2. Kesalahan dalam penganggaran
3. Penyerapan anggaran yang tidak tepat waktu
4. Penghapusan barang Milik Daerah yang sudah rusak berat dan tidak berfungsi dalam operasional Perangkat Daerah

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

1. Belum optimalnya kompetensi SDM yang ada, yang masih perlu pengembangan;
2. Banyak dan beragam aplikasi yang digunakan yang tidak terintegrasi.

- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Visi Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yaitu ‘SEMESTA BERENCANA’ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlaq, Makmur dan Berdaya Saing berbasis Agropolitan dengan semangat Gotong Royong dalam bingkai NKRI. Badan Keuangan Mengampu Misi ke tiga ‘Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima’ dengan indikator sasaran yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 103 /Kpts/013/2022 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah sejauh ini telah memenuhi target yang ditetapkan namun belum bisa

memberikan hasil terhadap pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan targetnya yaitu kategori baik. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan tidak terkait dan atau berdampak langsung terhadap NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Peluang

- Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.
- Adanya pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat, dana subsidi sebagai pendukung pembangunan yang ada di daerah.
- Munculnya Sumber Pajak baru sebagai Pendapatan Asli Daerah
- Terintegrasinya perencanaan dan penganggaran
- Pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran

Ancaman/Tantangan

- Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat, terkadang Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.
 - Banyaknya aset yang belum bersertifikasi, legalitas status mengakibatkan kesulitan untuk mengetahui keseluruhan jumlah aset yang dimiliki oleh daerah.
 - Informasi dana transfer dari pusat yang belum pasti dan terlambat, mengakibatkan kecenderungan berubah-ubahnya penyusunan anggaran di daerah
 - kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang masih perlu ditingkatkan
 - Banyaknya aset yang belum bersertifikasi, legalitas status mengakibatkan kesulitan untuk mengetahui keseluruhan jumlah aset yang dimiliki oleh daerah.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa dokumentasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- Pengelolaan Keuangan yang tertib masih menjadi isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas, sebagai tindaklanjut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 perihal Implentasi SIPD dalam Penyusunan Perencanaan, Penganggaran,

Penatausahaan dan Akuntansi Tahun 2024, maka terjadi perubahan mekanisme dari aplikasi SIPD menjadi aplikasi SIPD RI. Arsitektur SIPD RI dirancang menjadi aplikasi berbasis mikroservis untuk meningkatkan efektivitas dan kerja aplikasi untuk lebih optimal. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah ditetapkan tanggal 23 Januari 2023 dan akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan tertib, efektif dan efisien.

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka perlu penyesuaian terkait peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi yang ada. Diharapkan dengan telah ditetapkannya peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut mampu mendorong peningkatan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah agar sesuai dan dapat mengakomodir seluruh program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran tahun 2024 dalam menjalankan visi dan misi Kabupaten Ngawi sesuai dengan tugas dan fungsi, sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4		5	6	2	3	4		5	6
	BADAN KEUANGAN					533.971.283.542	BADAN KEUANGAN					525.878.838.349
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Dalam Setahun	Badan Keuangan	100	%	22.597.610.321	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Dalam Setahun	Badan Keuangan	100	%	23.297.544.988
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	210.150.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	163.741.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan OPD yang disusun	Badan Keuangan	4	Dokumen	47.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan OPD yang disusun	Badan Keuangan	4	Dokumen	22.392.000
		Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun	Badan Keuangan	22	Dokumen			Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun	Badan Keuangan	22	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Keuangan	1	Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Keuangan	1	Dokumen	9.400.000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Keuangan	1	Dokumen	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Keuangan	1	Dokumen	6.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Badan Keuangan	2	Dokumen	7.650.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Badan Keuangan	2	Dokumen	7.360.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Badan Keuangan	2	Dokumen	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Badan Keuangan	2	Dokumen	5.162.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Keuangan	7	Laporan	113.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Keuangan	7	Laporan	113.427.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	19.688.330.321	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	19.562.213.658
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Keuangan	1976	Orang/Bulan	19.680.829.421	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Badan Keuangan	28	Dokumen	19.555.276.658
	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	Badan Keuangan	26	Dokumen			Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	Badan Keuangan	1120	Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Keuangan	50	Dokumen	7.500.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Keuangan	50	Dokumen	6.937.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	393.100.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	386.362.500
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Badan Keuangan	2	paket	90.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Badan Keuangan	2	paket	83.280.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Badan Keuangan	40	Orang	303.100.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Badan Keuangan	40	Orang	303.082.500
	Jumlah Diklat dan pelatihan yang diadakan	Badan Keuangan	2	Kali			Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	2	Kali	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	642.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	639.841.360
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	100	%	11.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	100	%	10.783.360
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	100	%	183.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	100	%	182.475.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	2774	Kotak	14.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	3	Paket	14.137.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Keuangan	48393	Paket	115.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Keuangan	48393	Paket	115.210.000
	Jumlah barang yang digandakan	Badan Keuangan	20000	lembar			Jumlah barang yang digandakan	Badan Keuangan	50000	lembar	

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Keuangan	24	Laporan	10.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Keuangan	24	Laporan	10300000
	Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	Badan Keuangan	2000	Kotak			Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	Badan Keuangan	2000	Kotak	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Badan keuangan	36	Dokumen	126.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Badan keuangan	36	Dokumen	126.211.000
							Jumlah Sosialisasi / Bimtek Peraturan Perundang - Undangan yang diadakan	Badan keuangan	2	Kali	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan keuangan	60	Laporan	181.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan keuangan	200	Laporan	180.725.000
	Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	Badan keuangan	500	Kotak			Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	Badan keuangan	500	Kotak	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Dalam Setahun	Badan Keuangan	100	%	360.330.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Dalam Setahun	Badan Keuangan	100	%	1.138.297.970
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Badan keuangan	1	unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Badan keuangan	1	unit	472.468.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Badan keuangan	1	unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Badan keuangan	1	unit	313.761.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Badan Keuangan	5	Unit	34.080.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Badan Keuangan	5	Unit	25.883.000

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Badan Keuangan	1	Unit	293.600.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Badan Keuangan	1	Unit	293.590.970
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Badan Keuangan	3	unit	32.650.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Badan Keuangan	3	unit	32.595.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	1.083.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	1.129.118.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Keuangan	400	Laporan	3.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Keuangan	400	Laporan	2.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Badan Keuangan	12	Laporan	465.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Badan Keuangan	12	Laporan	451.703.000
	Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	Badan Keuangan	12	Kali			Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	Badan Keuangan	12	Kali	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	103	Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	103	Laporan	59.400.000
	Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan	Badan Keuangan	24	Bulan			Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan	Badan Keuangan	24	Bulan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	114	Orang / Bulan	615.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	114	Orang / Bulan	615.515.000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	219.900.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	277.970.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Badan Keuangan	1	Unit	55.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Badan Keuangan	1	Unit	62.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Badan Keuangan	39	Unit	79.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Badan Keuangan	39	Unit	68.900.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Badan Keuangan	45	Kali	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Badan Keuangan	45	Kali	32.070.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Badan Keuangan	1	Unit	20.900.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Badan Keuangan	1	Unit	100.000.000
		Luasan gedung kantor yang dipelihara	Badan Keuangan					Luasan gedung kantor yang dipelihara	Badan Keuangan			
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Badan Keuangan	10	kali	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Badan Keuangan	10	kali	15.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	508.275.766.221	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	441.893.123.915
		Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Badan Keuangan	85	%			Persentase kepatuhan realisasi anggaran SKPD	Badan Keuangan	85	%	

	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan Sesuai SAP	Badan Keuangan	100	%			Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan Sesuai SAP	Badan Keuangan	100	%	
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah regulasi dalam Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	Badan Keuangan	2	Dokumen	887.448.981	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran yang disusun Tepat Waktu	Badan Keuangan	2	Dokumen	999.965.500
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Badan Keuangan	94	Dokumen	155.351.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Badan Keuangan	94	Dokumen	99.351.000
	Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	4	kali			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	4	kali	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Badan Keuangan	94	Dokumen	235.886.981	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Badan Keuangan	94	Dokumen	99.084.000
	Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	4	kali			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	4	kali	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Badan Keuangan	235	Dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Badan Keuangan	235	Dokumen	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Badan Keuangan	235	Dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Badan Keuangan	235	Dokumen	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Badan Keuangan	92	Dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Badan Keuangan	92	Dokumen	20.550.000
								Badan Keuangan			

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Badan Keuangan	92	Dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Badan Keuangan	92	Dokumen	31.700.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Keuangan	2	Dokumen	220.246.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Keuangan	2	Dokumen	495.246.500
								Jumlah Dokumen informasi keuangan daerah yang dapat di akses publik	Badan Keuangan	1	Dokumen	
								Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	4	Kali	
								Jumlah DPA SKPD yang di verifikasi	Badan Keuangan	46	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Keuangan	5	Dokumen	245.465.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Keuangan	5	Dokumen	222.863.500
								Jumlah Dokumen informasi keuangan daerah yang dapat di akses publik	Badan Keuangan	1	Dokumen	
								Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	4	Kali	
								Jumlah Perubahan DPA SKPD yang di verifikasi	Badan Keuangan	46	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Badan Keuangan	2	Dokumen	30.500.000	Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Badan Keuangan	2	Dokumen	31.170.500
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan/ Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	12	Dokumen	851.229.500,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan/ Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	12	Dokumen	829.229.500,00

	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Keuangan	264	Dokumen	234.400.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Keuangan	264	Dokumen	153.213.500
								Persentase SILPA terhadap APBD	Badan Keuangan	0,7	%	
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Badan Keuangan	1	laporan	3.069.000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Badan Keuangan	1	laporan	5.580.000
								Persentase SILPA terhadap APBD	Badan Keuangan	0,7	%	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Badan Keuangan	28184	Dokumen	260.038.500	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Badan Keuangan	28184	Dokumen	385.478.000
								Jumlah SP2D yang Diterbitkan	Badan Keuangan	13998	Dokumen	
								Jumlah SPD yang di terbitkan	Badan Keuangan	184	Dokumen	
								Jumlah SPM yang Diteliti	Badan Keuangan	13998	Dokumen	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Keuangan	30	laporan	22.857.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Keuangan	42	laporan	22.857.000
								Jumlah LKT (Laporan Konfirmasi Transfer) yang disusun	Badan Keuangan	4	laporan	
								Jumlah Laporan dan Koordinasi Dana Transfer yang disusun	Badan Keuangan	38	laporan	

	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan lembaga Keuangan Bukan Bank		42	Dokumen	3.022.500	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan lembaga Keuangan Bukan Bank	Badan Keuangan	4	Dokumen	3.022.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Badan Keuangan	478	Laporan	61.573.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Badan Keuangan	478	Laporan	83.813.000
								Jumlah Laporan Gaji	Badan Keuangan	12	Laporan	
								Jumlah Rekonsiliasi Gaji	Badan Keuangan	12		
								Persentase Belanja Guru Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah APBD	Badan Keuangan	25	%	
								Jumlah Laporan Kas dan Perkiraan Belanja yang disusun	Badan Keuangan	12	Laporan	

							Jumlah SKPP yang diterbitkan	Badan Keuangan	254	Laporan	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Keuangan	270	Dokumen	22.903.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Keuangan	270	Dokumen	28.579.000
							Jumlah Rekonsiliasi BKU yang dilaksanakan	Badan Keuangan	4	Kali	
							Jumlah Rekonsiliasi DTH/RTH yang dilaksanakan	Badan Keuangan	12	Kali	
							Jumlah Rekonsiliasi Posisi Kas dengan Bank Jatim yang dilaksanakan	Badan Keuangan	250	Kali	
							Jumlah Rekonsiliasi SPJ Fungsional yang dilaksanakan	Badan Keuangan	4	Kali	
							Jumlah Rekonsiliasi dengan SKPD	Badan Keuangan	4	Kali	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		188	Orang	243.366.500	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan	188	Orang	146.686.500
							Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Badan Keuangan	2	Kali	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan Sesuai SAP	Badan Keuangan	2	Dokumen	945.275.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan Sesuai SAP	Badan Keuangan	2	Dokumen	984.475.000
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Badan Keuangan	168	Kali	120.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Badan Keuangan	144	Kali	108.430.000

	Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	Badan Keuangan	14000	Kali			Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	Badan Keuangan	16000	Kali	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	Badan Keuangan	732	Dokumen	122.670.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	Badan Keuangan	732	Dokumen	125.222.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun	Badan Keuangan	18	Laporan	85.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun	Badan Keuangan	18	Laporan	127.518.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Badan Keuangan	134	laporan	110.950.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Badan Keuangan	134	laporan	39.550.000
							Persentase Program Kegiatan yang tidak terlaksana	Badan Keuangan	10	%	
							Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	Badan Keuangan	1	%	
							Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya	Badan Keuangan	0,1	%	
							Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	Badan Keuangan	2	Dokumen	
							Jumlah Dokumen yang dapat diakses publik thd informasi keuangan Daerah	Badan Keuangan	1	Dokumen	

	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Badan Keuangan	9	Dokumen	137.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Badan Keuangan	9	Dokumen	159.438.000
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Keuangan	2	Dokumen	44.776.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Keuangan	2	Dokumen	107.014.000
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Keuangan	5	Dokumen	104.685.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Keuangan	5	Dokumen	171.339.000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	3	Kali	220.194.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Badan Keuangan	60	Orang	145.964.000
								Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1	Kali	
	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dlm setahun	Badan Keuangan	100	%	505.310.612.740	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dlm setahun	Badan Keuangan	100	%	438.776.688.415

	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapatkan ADD	Badan Keuangan	213	Desa	483.788.389.740	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Keuangan	12	Dokumen	422.540.805.600
		Jumlah desa yang mendapatkan SARPRAS	Badan Keuangan	213	Desa			persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer Expenditures)	Badan Keuangan	1	%	
		Jumlah desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan BINA MITRA	Badan Keuangan	9	Desa			Jumlah desa yang mendapatkan ADD	Badan Keuangan	213	Desa	
		Jumlah RT yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RT	Badan Keuangan	5604	RT			Jumlah desa yang mendapatkan SARPRAS	Badan Keuangan	213	Desa	
		Jumlah RW yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RW	Badan Keuangan	1212	RW			Jumlah RT yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RT	Badan Keuangan	5604	RT	
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Keuangan	12	Dokumen			Jumlah RW yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RW	Badan Keuangan	1212	RW	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Keuangan	10	Dokumen	11.411.630.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Keuangan	10	Dokumen	6.834.247.670
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Badan Keuangan	10	Dokumen	10.110.593.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Badan Keuangan	10	Dokumen	9.401.635.145
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Badan Keuangan	12	Dokumen			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Badan Keuangan	12	Dokumen	
								Persentase Jumlah Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa yang dikelola	Badan Keuangan	100	%	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	281.200.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	302.765.500

	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Badan Keuangan	1	Dokumen	125.700.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Badan Keuangan	1	Dokumen	241.765.500
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		92	Orang	155.500.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan	65	Orang	61.000.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang terdata dan layak	Badan Keuangan	91	%	1.065.838.500	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang terdata dan layak	Badan Keuangan	91	%	1.100.838.500
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	1.065.838.500	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	1.100.838.500
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Badan Keuangan	1	Dokumen	44.907.000	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Badan Keuangan	1	Dokumen	159.053.000
								Jumlah SKPD yang menyampaikan usulan SSH	Badan Keuangan	46	SKPD	
								Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	1	Kali	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	47	SKPD	37.465.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	46	SKPD	51.480.500
								Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD	Badan Keuangan	46	SKPD	
								Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	1	Kali	

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		1	Dokumen	41.254.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	1	Dokumen	96.162.000
							Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	1	Kali	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	1	Laporan	177.042.500	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	2	Laporan	175.148.500
							Jumlah Koordinasi dengan SKPD	Badan Keuangan	1	Kali	
							Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1	Kali	
							Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis	Badan Keuangan	75	Orang	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		5	Laporan	46.162.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	5	Laporan	46.162.000
							Jumlah Koordinasi dengan SKPD	Badan Keuangan	1	Kali	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	4	Laporan	231.994.500	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	4	Laporan	241.514.500
							Jumlah Dokumen asli Kepemilikan BMD yang disimpan	Badan Keuangan	2	Dokumen	

							Jumlah Koordinasi dengan SKPD	Badan Keuangan	1	Kali	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	5	Dokumen	189.547.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	5	Dokumen	105.179.000
							Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik	Badan Keuangan	2	Dokumen	
							Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	1	Kali	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	4	Kali	46.108.500	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	4	Kali	55.361.500
							Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	1	Kali	
							Jumlah Rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	4	Kali	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	47	Laporan	35.515.500	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	47	Laporan	52.408.500
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan	35 orang (1x35)		215.842.500	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan	35	Orang	118.369.000

		Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil pembinaan dilaksanakan	Badan Keuangan	47	SKPD			Jumlah SKPD yang menindaklanjuti hasil pembinaan dilaksanakan	Badan Keuangan	47	SKPD	
								Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1	Kali	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Keuangan	100	%	2.032.068.500	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Keuangan	100	%	2.267.209.000
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	100	%	2.032.068.500	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	100	%	2.267.209.000
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Keuangan	8	Dokumen	77.305.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Keuangan	8	Dokumen	93.748.000
								Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Perencanaan Pendapatan	Badan Keuangan	10	Kali	
								Jumlah pendampingan Aplikasi PBB dan BPHTB yang dilaksanakan	Badan Keuangan	2	Kali	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Badan Keuangan	3	Dokumen	73.695.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Badan Keuangan	3	Dokumen	89.873.000
								Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Pajak yang diselenggarakan	Badan Keuangan	35	Orang	
								Jumlah Koordinasi tentang Pengembangan Daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	3	Kali	

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Badan Keuangan	12	Laporan	12.310.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Badan Keuangan	12	Laporan	20.338.000
							Jumlah Potensi Wajib Pajak Daerah yang disurvei	Badan Keuangan	100	WP	
							Jumlah Obyek Pajak Daerah yang didata dan didaftarkan	Badan Keuangan	1500	Obyek	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Badan Keuangan	12	Dokumen	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Badan Keuangan	12	Laporan	12.340.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Badan Keuangan	12	Laporan	10.765.000
							Jumlah aplikasi pajak daerah yang dipelihara	Badan Keuangan	2	Aplikasi	
							Jumlah Pemeriksaan Obyek Pajak Daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	12	Kali	
							Jumlah Monitoring Pendapatan Daerah dan PBB yang dilaksanakan	Badan Keuangan	12	Kali	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Badan Keuangan	12	Dokumen	959.575.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Badan Keuangan	12	Dokumen	1.031.411.000
							Jumlah DHKP, SPPT dan SKPD yang dicetak	Badan Keuangan	636073	Dokumen	
							Jumlah Himbauan Pajak yang dicetak	Badan Keuangan	1000	Dokumen	

		Badan Keuangan					Jumlah Obyek Pajak Yang Ditetapkan	Badan Keuangan	637.933	OP	
							Jumlah Pendampingan Penetapan Wajib Pajak Daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	3	Kali	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Badan Keuangan	40	Layanan	37.990.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Badan Keuangan	40	Layanan	34.867.000
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Badan Keuangan	7	Dokumen	47.359.500	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Badan Keuangan	7	Dokumen	96.635.000
							Persentase Deviasi realisasi PAD thd anggaran PAD dalam APBD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	5	%	
							Jumlah Laporan Pendapatan Daerah yang disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	12	Dokumen	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Badan Keuangan	240	Dokumen	145.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Badan Keuangan	240	Dokumen	179.706.000
							Jumlah Kegiatan Intensifikasi / Penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	35	Kali	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Keuangan	8	Dokumen	666.494.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Keuangan	12	Dokumen	709.866.000
							Jumlah Dokumen Realisasi PBB yang di Publikasikan di Website	Badan Keuangan	1	Dokumen	

								Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik	Badan Keuangan	2	Kali	
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Badan Keuangan	12	Dokumen	709.866.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Keuangan merupakan OPD teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum fungsi penunjang urusan keuangan dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat maupun pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, tetap berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/ Kelurahan (Musrenbangdes / Musrenbangkel). Usulan yang lolos verifikasi pada musrenbangdes/musrenbangkel diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbangkec diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab) untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi. Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2024 :

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Ngawi**

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yaitu “Indonesia Berpenghasilan MenengahTinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”, kemudian RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Ngawi yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong” dan tetap pula memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025, yaitu Terwujudnya Kabupaten Ngawi Sejahtera dengan Bertumpu pada Potensi Pertanian, Industri dan Perdagangan yang Maju dan Berkelanjutan”. Sebagai upaya keselarasan dan sinergi dalam upaya pembangunan daerah, maka visi pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yaitu: **SEMESTA BERENCANA** “*Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI*” . Melalui visi pembangunan Kabupaten Ngawi selama lima tahun kedepan tersebut, diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Ngawi mampu untuk secara bersama-sama meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya serta kapasitasnya, sehingga terwujud “SEMESTA BERENCANA”.

Tema Pembangunan Kabupaten Ngawi tahun 2024 adalah : “ Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Nilai Tambah Pertanian Yang Didukung Oleh Pemantapan Infrastruktur Wilayah” Selanjutnya tema pembangunan di atas kan diterjemahkan melalui beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi di tahun 2024, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan daya saing SDM melalui pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- b. Peningkatan perekonomian daerah melalui nilai tambah pertanian;
- c. Penurunan tingkat kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pemantapan infrastruktur wilayah guna kemudahan distribusi dan peningkatan nilai tambah pertanian;
- e. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi yang optimal

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi. Mengacu Pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ngawi 2021-2026, Badan Keuangan bertanggungjawab Mendukung Misi Ke 3 Yaitu Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 telah ditetapkan Tujuan dan sasaran Badan Keuangan ;

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (peringkat Baik)
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap APBD
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib
2.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

3.3 Program Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sub Kegiatan adalah penjabaran dari proses atau aktivitas pelaksanaan kegiatan.

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3	5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2	5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2	5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
6	5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1	5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan
2	5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
4	5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5	5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
4	5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6	5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	5.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
1	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2	5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3	5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4	5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5	5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
6	5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7	5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8	5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
9	5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

1	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2	5.02.02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
3	5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
4	5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5	5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
7	5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
8	5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
1	5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2	5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
3	5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
4	5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
6	5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7	5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
8	5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
1	5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
2	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
3	5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
1	5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah
2	5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	
1	5.02.03.2.01.01 Penyusunan SSH
2	5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3	5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
5	5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
6	5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah
7	5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
8	5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
9	5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
10	5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
1	5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah
2	5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3	5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4	5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5	5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6	5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7	5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah
8	5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
9	5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
10	5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah
11	5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
12	5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut ;

- a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 - Pagu indikatif dan pemetaan program prioritas pada ranwal RKPD Tahun 2024.
 - Kesesuaian dengan Tugas pokok fungsi yang diampu Badan Keuangan.
- b. Uraian garis besar program, kegiatan dan sub kegiatan
 4. 4 Program, 14 kegiatan, dan 70 sub kegiatan dengan total pagu indikatif yaitu Rp. 533.971.283.541,66
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.
 5. Sudah sesuai
- d. Tabel dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana program/kegiatan/sub kegiatan PD tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 (Tahun n+1)
Kab. Ngawi**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Ca ta ta n Pe n ti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegi atan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Prog ram	Keluar an Sub Kegiata n	Hasil Kegi atan				Tolok Ukur	Target	
	BADAN KEUANGAN								533.971.283.541,00					543.375.387.355,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								511.394.573.221,00					520.748.357.355,00
5 0 2	KEUANGAN								511.394.573.221,00					520.748.357.355,00
5 0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								508.275.766.221,00					517.337.600.855,00
5 0 2	2.0 2 1								887.448.981,00					1.225.463.300,00
5 0 2	2.0 2 1	0 1												
		-	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	94 Dokumen	-	155.351.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	94 Dokumen	156.514.000,00
5 0 2	2.0 2 1	0 2												
		-	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	-	- Kab. Ngawi, Semua	-	94 Dokumen	-	235.886.981,00	PEND APATAN		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	94 Dokumen	159.981.400,00

					Disusun			Kecamatan, Semua Kel/ Desa				TRANSFER		Disusun			
5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD												
	2	2	1	3		-	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	92 Dokumen	-	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	92 Dokumen	98.500.000,00
5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD												
	2	2	1	4		-	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	92 Dokumen	-	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	92 Dokumen	135.000.000,00
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD												
	2	2	1	7		-	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	2 Dokumen	-	220.246.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	230.000.000,00
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD												
	2	2	1	8													

						-	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	9 Dokumen	-	245.465.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	9 Dokumen	266.157.900,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
						-	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	2 Dokumen	-	30.500.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	179.310.000,00	
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										851.229.500,00				885.278.680,00
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	264 Dokumen	-	234.400.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	264 Dokumen	243.776.000,00	
5	0	0	2.0	0	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
						-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Laporan	-	3.069.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	3.191.760,00	
5	0	0	2.0	0	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														

						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	28184 Dokumen	-	260.038.500,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	28184 Dokumen	270.440.040,00
5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	42 Dokumen	-	22.857.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42 Dokumen	23.771.280,00
5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	4 Dokumen	-	3.022.500,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	3.143.400,00
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)													

						-	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	478 Laporan	-	61.573.000,00	PEND APATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	478 Laporan	64.035.920,00
5	0	0	2.0	0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait												
						-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	270 Dokumen	-	22.903.000,00	PEND APATAN TRANSFER	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	270 Dokumen	23.819.120,00
5	0	0	2.0	1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota												
	2	2	2	1													

						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	188 Orang	-	243.366.500,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	188 Orang	253.101.160,00
5	0	0	2.0				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						945.275.000,00					1.051.332.000,00
5	0	0	2.0	0			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah											
						-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	144 Laporan	-	120.000.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	144 Laporan	125.000.000,00
5	0	0	2.0	0			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban											
						-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	732 Dokumen	-	122.670.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	732 Dokumen	125.000.000,00
5	0	0	2.0	0			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran											
						-	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	18 Laporan	-	85.000.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	110.000.000,00
5	0	0	2.0	0			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											

						-	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	134 Laporan	-	110.950.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	134 Laporan	115.000.000,00
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
						-	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	9 Dokumen	-	137.000.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	9 Dokumen	142.000.000,00
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	2 Dokumen	-	44.776.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	75.000.000,00
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah													
						-	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	5 Dokumen	-	104.685.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	119.758.000,00
5	0	0	2.0	1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan													
2	2	2	3	1														

					Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota												
					-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	60 Orang	-	220.194.000,00	PEND APATAN TRANSFER	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	239.574.000,00	
5	0	0	2.0		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						505.310.612.740,00					513.885.526.875,00	
5	0	0	2.0	0	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan												
					-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	12 Laporan	-	483.788.389.740,00	PEND APATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	491.598.924.475,00	
5	0	0	2.0	0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak												
					-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	12 Laporan	-	11.411.630.000,00	PEND APATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	11.411.630.000,00	
5	0	0	2.0	1	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota												
					-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	12 Laporan	-	10.110.593.000,00	PEND APATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	10.874.972.400,00	
5	0	0	2.0		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						281.200.000,00					290.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah												

						-	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	1 Dokumen	-	125.700.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	130.000.000,00		
5	0	0	2.0	0	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	92 Orang	-	155.500.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	92 Orang	160.000.000,00		
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										1.065.838.500,00					996.500.000,00
5	0	0	2.0		Pengelolaan Barang Milik Daerah										1.065.838.500,00					996.500.000,00
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Standar Harga															
						-	0	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	00	-	44.907.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		0	00	125.000.000,00		
						-	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	1 Dokumen	-	44.907.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	125.000.000,00		
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah															
						-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	47 Dokumen	-	37.465.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	47 Dokumen	52.000.000,00		

5	0	0	2.0	0	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah												
	2	3	1	4		-	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	1 Dokumen	-	41.254.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	65.000.000,00
5	0	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah												
						-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	1 Laporan	-	177.042.500,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	180.000.000,00
5	0	0	2.0	0	Inventarisasi Barang Milik Daerah												
						-	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	5 Laporan	-	46.162.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5 Laporan	50.000.000,00
5	0	0	2.0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah												
						-	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	4 Laporan	-	231.994.500,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	24.500.000,00
5	0	0	2.0	1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah												
						-	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	5 Dokumen	-	189.547.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	190.000.000,00
5	0	0	2.0	1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah												

	2	3	1	1														
						-	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	4 Laporan	-	46.108.500,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	50.000.000,00
5	0	0	2.0	1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
	2	3	1	2		-	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	47 Laporan	-	35.515.500,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	47 Laporan	40.000.000,00
5	0	0	2.0	1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
	2	3	1	3		-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	47 Orang	-	215.842.500,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47 Orang	220.000.000,00
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
	2	4											2.032.068.500,00					2.384.256.500,00
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah													
	2	4	1										2.032.068.500,00					2.384.256.500,00
5	0	0	2.0	0	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah													
	2	4	1	1		-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	10 Dokumen	-	77.305.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Dokumen	77.785.000,00
5	0	0	2.0	0	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
	2	4	1	2														

						-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	-	-	73.695.000,00	PEND APATAN TRANSFER	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	73.695.000,00
5	0	0	2.0	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah												
						-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	-	-	12.310.000,00	PEND APATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	31.060.000,00
5	0	0	2.0	0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah												
						-	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	12 Laporan	-	12.340.000,00	PEND APATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	31.060.000,00
5	0	0	2.0	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah												
						-	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	615750 Dokumen	-	959.575.000,00	PEND APATAN TRANSFER	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	615750 Dokumen	1.096.735.000,00
5	0	0	2.0	0	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah												
						-	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	-	-	37.990.000,00	PEND APATAN TRANSFER	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	37.990.000,00
5	0	0	2.0	1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah												

						-	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	-	-	47.359.500,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-	110.437.500,00				
5	0	0	2.0	1	Penagihan Pajak Daerah																	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	240	Dokumen	-	145.000.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	240	Dokumen	220.000.000,00		
5	0	0	2.0	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	8	Dokumen	-	666.494.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8	Dokumen	705.494.000,00		
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													20.900.000,00				30.000.000,00
5	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													20.900.000,00				30.000.000,00
5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Semua Kel/ Desa	-	1	Unit	-	20.900.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	30.000.000,00		
X					-													22.576.710.320,00				22.627.030.000,00
X	X				-													22.576.710.320,00				22.627.030.000,00
X	X	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													210.150.000,00				180.000.000,00
X	X	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
X	X	1	1	1																		

						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	11 Dokumen	-	47.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	25.000.000,00
X	X X	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
						-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	2 Dokumen	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00
X	X X	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												

						-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	4 Dokumen	-	6.500.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	7.000.000,00	
X	X X	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	2 Dokumen	-	7.650.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000,00	
X	X X	0 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	4 Dokumen	-	5.500.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	6.000.000,00	
X	X X	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	6 Laporan	-	113.500.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	114.000.000,00
X	X	0	2.0				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.688.330.320,00					19.698.000.000,00
X	X	0	2.0	0			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	-	1120 Orang/bulan	-	19.680.829.420,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1120 Orang/bulan	19.690.000.000,00
X	X	0	2.0	0			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	48 Laporan	-	7.500.900,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	48 Laporan	8.000.000,00
X	X	0	2.0				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						393.100.000,00					392.750.000,00
X	X	0	2.0	0			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
						-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Paket	-	90.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	89.600.000,00
X	X	0	2.0	0			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

						-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	150 Orang	-	303.100.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	303.150.000,00		
X	X	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah								642.000.000,00						712.750.000,00	
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Paket	-	11.000.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.500.000,00		
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Paket	-	183.000.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	183.250.000,00		
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	3 Paket	-	14.500.000,00	PEND APATAN TRANSFER		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.750.000,00		

						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	200 Laporan	-	181.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	250.000.000,00	
X	X	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								360.330.000,00					360.580.000,00	
X	X	0	2.0	0	Pengadaan Mebel														
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	7 Unit	-	34.080.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	34.080.000,00	
X	X	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	30 Unit	-	293.600.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	293.750.000,00	
X	X	0	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	5 Unit	-	32.650.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	32.750.000,00	
X	X	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.083.800.000,00					1.083.950.000,00	

X	X	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
	X	1	8	1		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	500 Laporan	-	3.200.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	3.200.000,00
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
	X	1	8	2		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	60 Laporan	-	465.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	465.000.000,00
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
	X	1	8	4		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	12 Laporan	-	615.600.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	615.750.000,00
X	X	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							199.000.000,00					
	X	1	9														
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
	X	1	9	1													

						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Unit	-	55.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	55.000.000,00		
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	44 Unit	-	79.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	79.000.000,00		
X	X	0	2.0	0	Pemeliharaan Mebel															
						-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	15 Unit	-	15.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15.000.000,00		
X	X	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	- Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	47 Unit	-	50.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	50.000.000,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan serta visi misi Pemerintah Kabupaten Ngawi 2021 -2026 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2024. Renja Badan Keuangan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

- a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan

Renja Badan Keuangan ini sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, selain itu, Renja Badan Keuangan Tahun 2024 juga memiliki fungsi evaluative terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun sebelumnya.

Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan maka perlu dilakukan pemetaan kembali terhadap skala prioritas indikator kinerja, untuk kemudian dijadikan dasar pengusulan tambahan pagu pada APBD Tahun berjalan atau APBD Tahun selanjutnya.

- b. Kaidah Pelaksanaan

Renja Badan Keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
 - b. Merumuskan program dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
 - c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
 - d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
 - e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.
- c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Badan Keuangan , maka rekomendasi untuk pengelola keuangan Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;

- b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan asset daerah;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.

Dengan tersusunnya Renja Badan Keuangan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Akhir kata semoga Renja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.